Metabolisme perkotaan dalam pengembangan Kebijakan Pangan Food Estate: Implikasi terhadap transformasi sosio spasial perdesaan dan perkotaan di Indonesia

PROGRAM RISET MUDA ITB 2026

Dr. Isnu Putra Pratama, ST., MPWK.[1], Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc.[1], Dr. Niken Prilandita, S.T, M.Sc.[1]

[1] Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Latar Belakang

Perkembangan lumbung pangan Kabupaten Merauke sudah berjalan dari awal tahun 1905 hingga sekarang. Sukayat dkk. (2023) mengaitkan perkembangan tersebut secara langsung dengan populasi pendatang. Mereka mencatat bahwa para petani yang menggarap sawah di berbagai distrik di Merauke seluruhnya berasal dari Jawa—merupakan transmigran dari tahun 1980-an dan 1990-an yang telah memiliki keterampilan bertani padi sawah—beserta keturunan mereka. Pemukiman dalam skala sebesar ini telah menghasilkan formasi sosial yang sangat heterogen.

Di bawah narasi ketahanan pangan, pemerintah Indonesia mengupayakan pembangunan kawasan *food and energy estate* (salah satunya di Merauke). Penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan kemudahan berupa percepatan perizinan dan pengadaan lahan. Upaya serupa pernah dilakukan sebelumnya di lokasi yang sama, yakni melalui *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang diluncurkan pada tahun 2010, namun implementasinya terhenti jauh sebelum mencapai skala yang direncanakan (Ito dkk., 2014; Dewi, 2016). Skema kawasan *food and energy estate* saat ini mencakup luas wilayah yang kira-kira dua kali lipat dari alokasi untuk MIFEE, dan dampak ekologis dari perluasan tersebut akan ditanggung oleh suatu kawasan yang menyimpan salah satu hamparan hutan tropis terbesar yang masih tersisa di dunia.

Keyword: Food Estate, Kawasan Transmigrasi, Merauke, Extended Urbanization, Extended Ruralization

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses yang saling terkait dan dinamis antara *extended urbanisation* dan *extended ruralisation*. Bagi studi perdesaan, penelitian ini menawarkan penataan mengenai proses ruralisasi dan urbanisasi—suatu aspek yang selama ini belum dirinci dalam perdebatan yang ada—sekaligus menjawab seruan Ghosh (2022) akan pentingnya spesifisitas historis, serta menanggapi pengamatannya bahwa ekspansi agribisnis di Indonesia belum tercakup dalam pengembangan konsep tersebut. Bagi studi perkotaan, artikel ini menyajikan penjelasan mengenai bagaimana suatu lanskap operasional menjadi dapat dioperasikan—sebuah pertanyaan yang selama ini luput diajukan dalam kerangka urbanisasi ekstensif yang cenderung berfokus pada aspek ekstraktif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis yang memadukan masa tinggal cukup lama di permukiman transmigrasi di distrik Kurik, Semangga, Tanah Miring, dan Muting, dengan pengamatan terhadap praktik budidaya serta kehidupan di permukiman agraria tersebut. Sebanyak 20 wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap empat kelompok: pejabat dari kementerian; staf instansi Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke; perwakilan perusahaan yang berafiliasi dengan *food estate*; penduduk transmigran dan komunitas masyarakat adat Papua. Data-data sekunder mengugnakan data statistik nasional dan regional, dokumen perencanaan serta evaluasi pemerintah—termasuk kajian lingkungan strategis yang disusun untuk program *food estate*—serta laporan perusahaan dan investasi terkait kegiatan industri tersebut.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan *extended urbanisation* berkaitan dengan *extended ruralisation*. Kebijakan transmigrasi penduduk dari Jawa menghadirkan sistem agraria, praktik pertanian padi sawah, serta hubungan pasar agraria yang mereproduksi ruang-ruang perdesaan; hal-hal inilah yang menjadi modal dasar bagi terbangunnya lanskap operasional di kemudian hari. Dengan demikian, perdesaan tetap menjadi titik awal historis—bukan sekadar sebagai lahan pasif, melainkan sebagai penyedia kondisi yang memungkinkan berlangsungnya operasionalisasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa urbanisasi agro-industri bergantung pada program-program perdesaan, padahal di saat yang sama, urbanisasi tersebut justru mengikis kondisi-kondisi yang diperlukan bagi reproduksi perdesaan itu sendiri—sebuah hubungan yang tidak dapat ditangkap oleh dikotomi perdesaan-perkotaan.

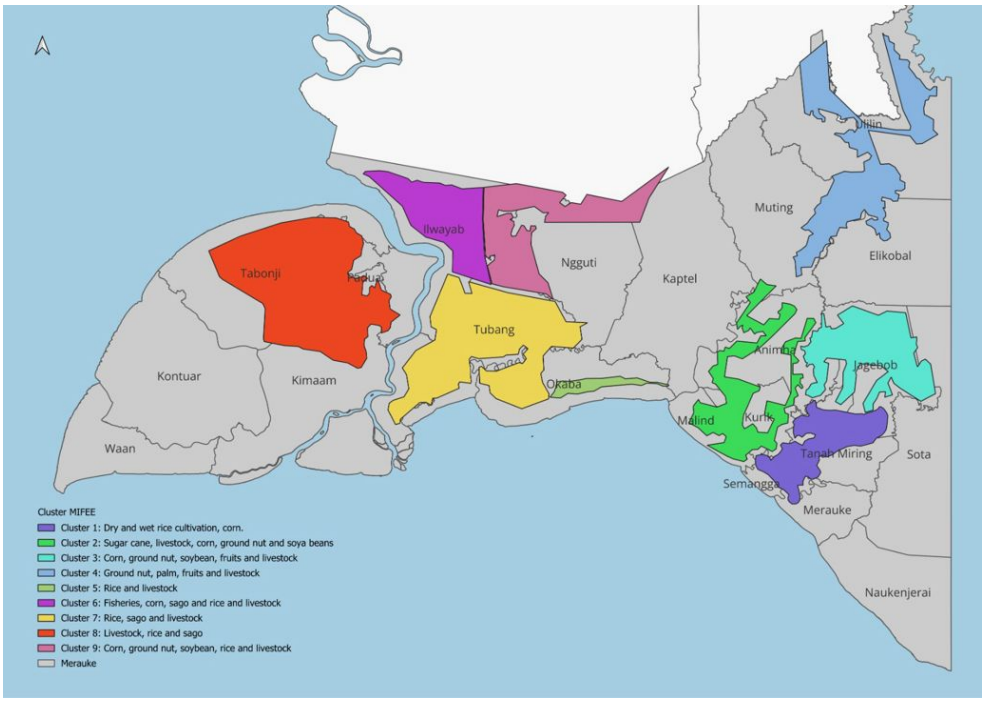


Gambar 2. Lanskap Kampung Transmigran di Distrik Tanah Miring

Kesimpulan dan Rekomendasi

Orientasi pengembangan food estate di Merauke perlu bergeser dari logika perluasan areal menuju penguatan keterkaitan wilayah. Kawasan transmigrasi yang telah lama ada layak diposisikan sebagai pusat pengembangan wilayah berbasis agropolitan yang terhubung antara hulu produksi dan hilirisasi berbasis nilai tambah komoditas. Infrastruktur pendukungnya perlu dirancang sebagai simpul layanan bersama yang terbuka dua arah bagi petani transmigran maupun warga kampung adat.

Kebijakan tersebut akan mendorong relasi desa-kota dari metabolisme komoditas yang produktif serta regeneratif. Keseluruhannya diikat oleh satu peta kawasan hasil penampalan delineasi proyek strategis, kawasan transmigrasi, tata ruang, wilayah adat, dan kawasan hutan, serta indikator keberhasilan yang disepakati sejak awal bersama pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat, sehingga percepatan pembangunan dipertanggungjawabkan bukan melalui serapan anggaran, melainkan melalui mutu kehidupan orang-orang yang menetap di sana.



Gambar 1. Peta Klaster MIFEE